

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGIDAP
GANGGUAN KEJIWAAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**ILHAM PUTRA SUSANTO
NIM : 145010100111091**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN

ILHAM PUTRA SUSANTO
NIM : 145010100111091

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

Fines Fatimah, S.H., M.H.
NIK. 2012088611212001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 196208051988021001

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

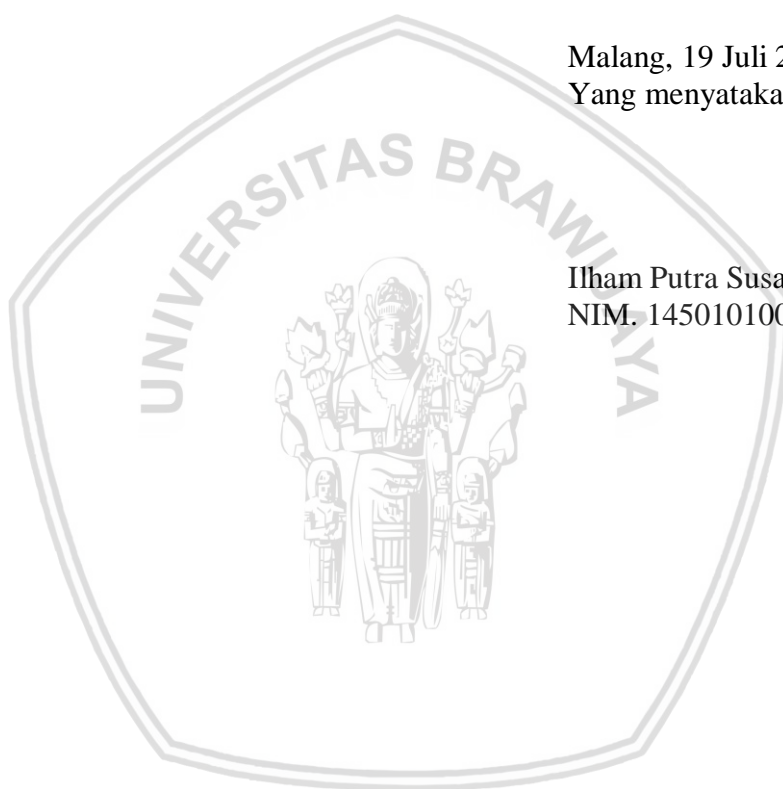
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 19 Juli 2018
Yang menyatakan,

Ilham Putra Susanto
NIM. 145010100111091



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan masukan dan izin kepada saya dalam penulisan tugas akhir saya.
3. Ibu Dr. Yuliati, SH., LLM selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan masukan-masukan serta motivasi kepada saya untuk dapat menyempurnakan hasil tugas akhir saya ini dan sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir ini.
4. Ibu Fines Fatimah, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan masukan dengan sabar, bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkanku sampai terselesainya tugas akhir ini.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis dan memberikan informasi – informasi penting dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Mama, Papa dan Kakak-Kakak ku doamu setiap hari, sepanjang malam tak pernah putus kau panjatkan hanya untuk anakmu ini meraih kesuksesan. Nasehat serta saran yang kalian berikan selalu membuatku terus belajar untuk menjadi lebih dewasa
2. Sahabat seperjuangan Irma, Meggy, Danang, Ega, Yuly, Daniel, Ulfa, Kaka, Kiki, Ape, Evita, Hazrina, Niche, Silvia, Milla, Anika, Tisof, Agoy, Dilla, Nandya, Razin, dan Habib yang selalu memberikan bantuan serta dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3. Seluruh rekan tim Macabre Player yang selalu mendukung dan memberikan inspirasi guna mempercepat penyelesaian tugas akhir ini.

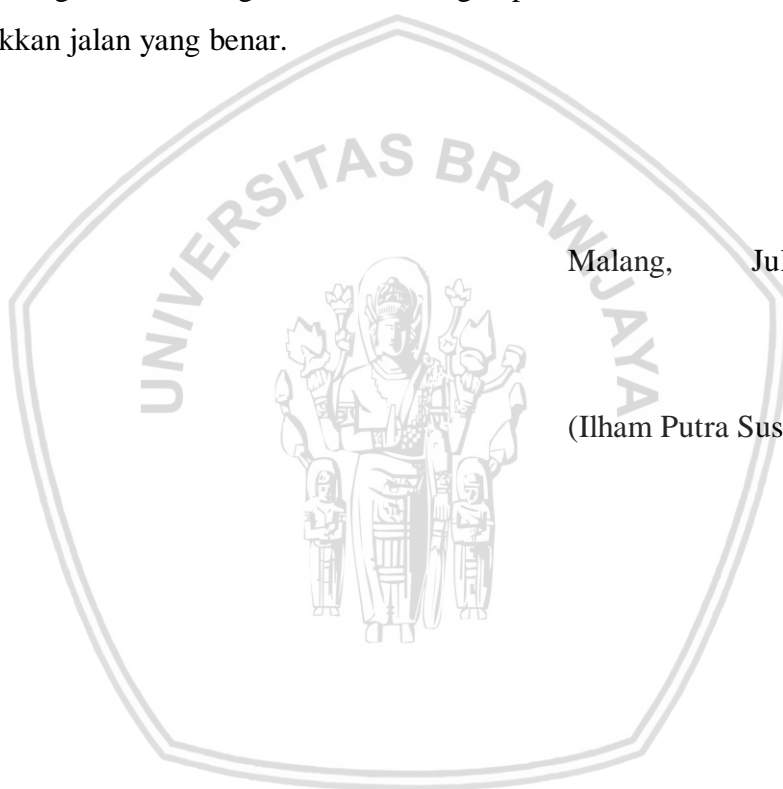
Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juli 2018

(Ilham Putra Susanto)



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Ringkasan	ix
Summary	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
F. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	11
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	12
a. Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana	13
b. Kesengajaan (<i>Dolus</i>)	14
c. Bentuk-Bentuk Kesengajaan	15
d. Kealpaan (<i>Culpa</i>)	16
2. Kemampuan Bertanggungjawab.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pemidanaan	22
E. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman.....	26
F. Tinjauan Umum Tentang Skizofrenia.....	27
1. Pengertian Skizofrenia	27
2. Tanda dan Gejala Skizofrenia	28
3. Jenis Skizofrenia	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	34
1. Bahan Hukum Primer	34
2. Bahan Hukum Sekunder	35
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
F. Definisi Konseptua;	36
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Pengidap Gangguan Kejiwaan.....	37
1. Posisi Kasus	
a. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016	39

b. Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017.....	41
2. Dasar Pertimbangan Hakim	
a. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016.....	46
b. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017	59
B. Implikasi Yuridis Dari Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh PengidapGangguan Kejiwaan	
1. Penafsiran Pasal 44 KUHP dan Doktrin Para Ahli Mengenai Penilaian Kondisi Kejiwaan Seseorang.....	65
2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional.....	69
3. Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Perspektif Disparitas	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Orisinalitas Penelitian	8
Tabel 4.1	Persamaan Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dengan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017.....	43
Tabel 4.2	Perbedaan Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dengan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017.....	44



RINGKASAN

Ilham Putra Susanto, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN, Dr. Yuliati, S.H., LL.M., Fines Fatimah, S.H., M.H.

Di Indonesia hakim dalam memutus suatu perkara juga dapat melakukan penafsiran-penafsiran sebagai bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Secara tidak langsung karena hal tersebut maka antar satu putusan dengan putusan lain sangat mungkin terjadi disparitas putusan dimana hal tersebut bukanlah suatu hal yang dilarang di Indonesia. Namun dengan adanya disparitas dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Pasal 44 KUHP merupakan pasal yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan jiwa. Hakim seringkali berbeda penafsiran mengenai ketentuan dari pasal tersebut seperti halnya dalam putusan Putusan ung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017. Dari dua putusan tersebut terdapat persamaan yaitu kedua terpidana sama-sama mengidap gangguan kejiwaan jenis skizofrenia yang dibuktikan oleh keterangan ahli kejiwaan. Namun kedua putusan tersebut memiliki perbedaan putusan yakni dalam putusan pertama majelis hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, sedangkan dalam putusan kedua hakim sependapat dengan keterangan ahli dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus permasalahan pada penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim sehingga timbul disparitas dan apa implikasi yuridis dari adanya disparitas dari kedua putusan tersebut.

Guna menjawab rumusan masalah, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum primer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal.

Berdasarkan hasil penelitian, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berakibat timbulnya disparitas adalah perbedaan penafsiran hakim mengenai penilaian hakim terhadap keterangan ahli kejiwaan mengenai kondisi kejiwaan dari terdakwa. Dalam peraturan perundang-undangan memang hakim bebas menilai, namun menurut penulis hal ini kurang tepat karena menilai kondisi kejiwaan dari terdakwa bukanlah kompetensi yang dimiliki oleh hakim sehingga sepatutnya hakim lebih mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh ahli karena hal ini dapat menjadikan ketidakpastian dari pasal 44 KUHP tersebut.

SUMMARY

Ilham Putra Susanto, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya, June 2018, DISPARITY OF JURISPRUDENCE IN THE PENSION OF CRIMINAL SANCTION TO THE CRIMINAL ACT OF INCIDENT BY DISCRETIONS OF PSYCHIATRIC DISORDER, Dr. Yuliati, S.H., LL.M., Fines Fatimah, S.H., M.H.

In Indonesia judges in deciding a case can also perform interpretations as a form of judicial discovery made by the judge. Indirectly because it is then between one decision with another decision is very likely to occur disparity decision where it is not a thing that is prohibited in Indonesia. However, with the existence of disparity it is feared to create legal uncertainty which ultimately leads to injustice for the parties. Article 44 of the Criminal Code is a section that regulates the criminal responsibility for people with mental disorders. Judges are often different in interpretation of the provisions of the article as in the verdict of Decision Number: 94-K / PM.II-09 / AD / V / 2016 and Decision Number: 109-K / PM.III-12 / AL / VI / 2017. Of the two verdicts there are equations that the two convicts are both suffering from psychiatric disorders type of schizophrenia as evidenced by the information of psychiatrist. However, the two decisions have different decisions, namely in the first decision the panel of judges disagrees with the expert's information and imposed the imprisonment on the defendant, whereas in the verdict the two judges agree with the expert statement and release the defendant from all charges

Based on the above background, the focus of the problem in this research is what is the basis of the judge's consideration so that there is disparity and what is the juridical implication of the disparity of both decision.

In order to answer the problem formulation, the researcher uses the research method with the type of normative juridical research with the approach of legislation and case approach. Legal material related to the problem in this research is obtained through literature study. Furthermore, primary and secondary legal materials were analyzed using systematic interpretation and grammatical interpretation.

Based on the result of the research, the basic of judge consideration in deciding the case which resulted in the incidence of disparity is the difference of judges' interpretation of judge's assessment of psychiatric information about the psychological condition of the defendant. In the legislation, the judge is free to judge, but according to the writer this is not appropriate because assessing the psychological condition of the defendant is not the competence possessed by the judge so it is fitting for the judge to consider the information conveyed by the expert because this can make the uncertainty of Article 44 of the Criminal Code .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan norma yang memberi suatu konsekuensi atas suatu perbuatan. Hukum pada hakikatnya abstrak, namun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret.¹ Di Indonesia, dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan walaupun tidak ada hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), yang mana dinyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Sehingga hakim diminta untuk menggali hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Hakim dalam memutus suatu perkara juga dapat melakukan penafsiran-penafsiran sebagai bentuk dari penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim. Penafsiran dan pertimbangan tersebut menjadi salah satu kewenangan yang dibenarkan secara hukum untuk hakim. Secara tidak langsung atas hal tersebut maka antar satu putusan dengan putusan lain sangat mungkin tidak sama, karena *precedent* tidak dianut oleh Indonesia. Hukum Indonesia hanya mengenal yurisprudensi, namun yurisprudensi tersebut tidak bersifat wajib untuk diikuti hakim sesudahnya. Yurisprudensi yang berlaku di Indonesia boleh diikuti namun tidak diwajibkan untuk diikuti. Terhadap kewenangan

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Sebuah Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm 9.

hakim yang demikian, oleh karenanya sangat mungkin muncul disparitas putusan.

Disparitas putusan hakim merupakan masalah yang menjadi perhatian dan menjadi problematika terhadap penegakan hukum di Indonesia. Disparitas putusan adalah perbedaan putusan terhadap tindak pidana yang sama. Perbedaan putusan atau disparitas ini adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.² Disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dengan adanya disparitas pidana membawa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi terpidana dan bagi khalayak masyarakat dan menimbulkan kecemburuan sosial, bahkan pandangan yang negatif oleh masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari disekitar kita dapat kita jumpai beberapa orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut berbuat sesuatu hal yang terkadang hal tersebut berujung menjadi suatu tindak pidana. Yustinus Semiun didalam bukunya memberikan pengertian gangguan mental adalah sebagai gangguan atau penyakit yang menghalangi seseorang untuk hidup sehat seperti yang diinginkan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.³ Di Indonesia terdapat pedoman untuk menggolongkan gangguan kejiwaan yang terdapat dalam Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) yang sudah

² Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), hlm. 24.

³ Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental, Cet. 5* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 9.

memiliki tiga versi yaitu PPDGJ I, II, dan III.⁴ Salah satu jenis gangguan jiwa adalah Skizofrenia. Skizofrenia merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, tak selalu bersifat kronis, dan tergantung pada perimbangan pengaruh genetic, fisik, dan sosial budaya. Pengertian skizofrenia adalah gangguan jiwa menetap, bersifat kronis, dan bisa terjadi kekambuhan dengan gejala psikotik beranekaragam dan tidak khas seperti penurunan fungsi kognitif yang disertai halusinasi dan waham, afek datar, disorganisasi perilaku dan memburuknya hubungan sosial.

Pada kasus Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 majelis hakim menyatakan terpidana Kopda Khotibul Umam bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari kepadanya. Dalam Visum Et Repertum No. 26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K) disimpulkan bahwa terpidana menderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia yang didiagnosa banding dengan lobuls temporal, karena gangguan ini terpidana tidak mampu membedakan antara fantasi dengan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti orang normal.

⁴ Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) merupakan buku acuan diagnosis gangguan jiwa yang berlaku dan digunakan di Indonesia. PPDGJ diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Dalam penghimpunannya, PPDGJ mengacu pada dua kitab/buku panduan diagnosis internasional lainnya yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA) yang mengalami beberapa revisi dan International Classification of Diseases (ICD) yang diterbitkan oleh World Health Organization (WHO). Dan dalam perkembangannya, PPDGJ memiliki beragam versi PPDGJ-I diterbitkan pada tahun 1973 didalamnya masih mencantumkan homoseksualitas sebagai salah satu penyakit dan gangguan kejiwaan, diagnosis nya mengacu pada ICD 8 (disahkan oleh WHO pada 1965) dan masih menggunakan sistem numerik. Kemudian PPDGJ-II diterbitkan pada tahun 1983 didalamnya mencantumkan konsep klasifikasi dengan kelas diagnosis memakai kriteria DSM-III dan dengan diagnosis monoaksial serta mengacu pada ICD 9. Terakhir PPDGJ-III yang diterbitkan pada tahun 1993 merupakan revisi terakhir yang masih menjadi panduan diagnosis gangguan jiwa yang valid bagi psikolog dan psikiatri di Indonesia, merujuk pada standart dan sistem pengkodean dari International Classification of Disease (ICD-10) dan sistem multiaksis dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV)

Hal ini juga dikuatkan oleh saksi lain yang sering melihat terpidana melakukan tindakan aneh sehari-hari seperti bertelanjang dada sambil mengikatkan baju dikepala, mencorat-coret dinding dan tiang listrik dengan tulisan-tulisan arab menggunakan spidol, dan terkadang berbicara atau marah-marah sendiri.

Sedangkan dalam putusan lain yakni Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017 majelis hakim menyatakan bahwa terpidana Serka Bambang Susilo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan melepaskan terpidana dari tuntutan disebabkan terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia. Hal ini berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan di dalam persidangan dengan disertai Laporan Medik Psikiatri penderita dari Rumkital Dr. Ramelan An. Sertu Mar Bambang Susilo yang pada kesimpulannya menyampaikan bahwa terpidana mengidap gangguan kejiwaan berat jenis skizofrenia dan terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari dua putusan diatas terdapat dua persamaan yaitu status dari kedua terpidana merupakan anggota TNI dan keduanya memiliki gangguan kejiwaan berat jenis skizofrenia. Selain dua persamaan, dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan yang sangat penting yaitu putusan nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 menjatuhkan pidana kepada terpidana, sedangkan putusan nomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017 membebaskan terpidana. Perbedaan putusan tersebut dikarenakan dalam pertimbangannya hakim memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai kondisi kejiwaan terpidana berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan walaupun ahli

sama-sama menyatakan bahwa terpidana menderita gangguan kejiwaan berat jenis skizofrenia dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena perbedaan pandangan atau pertimbangan dari masing-masing hakim itulah sehingga timbul disparitas putusan antara kedua putusan tersebut. Melihat uraian dalam latar belakang ini, terutama karena adanya disparitas pemidanaan pada putusan-putusan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim sehingga timbul disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan?
2. Apa implikasi yuridis dari disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga timbul disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana terkait disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat membantu memberikan masukan tentang pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana terkait dengan adanya penyebab dan penanggulangan disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan.

b. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian bagi para pembaca, khususnya masukan bagi aparat penegak hukum yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan. Sehingga putusan yang diberikan memenuhi rasa keadilan bagi terpidana korban maupun bagi masyarakat yang mengetahui.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan kepada masyarakat terkait dengan penyebab serta penanggulangan adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan.

E. Sistematika Penulisan

Laporan hasil penulisan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai penulisan laporan penelitian yang terdiri dari latar belakang yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana oleh oknum TNI pengidap skizofrenia.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum yang berisikan sub pokok sebagai referensi dan berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan metode penelitian yang akan dipakai, yaitu mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang digunakan, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik memperoleh data, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis tentang disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

F. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Stefania Yunita Adriana Mero, 2017, Fakultas Hukum/ Universitas Brawijaya	Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Disersi di Pengadilan Militer	Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas terhadap pelaku tindak pidana disersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia?	Penelitian sebelumnya berfokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana disersi yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia sehingga bisa menimbulkan disparitas putusan. Sedangkan pada penelitian ini menitikberatkan pada disparitas hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pengidap gangguan kejiwaan Skizofrenia
2.	Idham Suryansyah, 2017, Fakultas Hukum/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan	1. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengetahui pelaku kejahatan mempunyai gangguan kejiwaan? 2. Bagaimana proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai gangguan kejiwaan?	Penelitian sebelumnya berfokus pada upaya penyidik untuk mengetahui kondisi kejiwaan dari tersangka dan upaya hukum selanjutnya dari tersangka yang mempunyai gangguan kejiwaan. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengidap gangguan kejiwaan Skizofrenia.

3.	Hendrayanto, 2016, Fakultas Hukum/Universitas Trunojoyo Madura	Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Mengidap Skizofrenia Terkait Pasal 44 KUHP	Bagaimana pertanggungjawaban tersangka yang diduga mengidap Skizofrenia menurut Hukum Pidana Positif?	Penelitian sebelumnya berfokus pada pertanggungjawaban tersangka yang diduga mengidap Skizofrenia berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengidap gangguan kejiwaan Skizofrenia.
----	--	--	---	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵

Unsur-unsur tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yaitu:

1. Aliran monistis

Aliran monistis adalah aliran yang memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana melekat pada sebagai tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat pada orang yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Simon yang merupakan penganut aliran monistis menyatakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

⁵ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 16

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam dengan pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

2. Aliran dualistis

Aliran dualistis adalah aliran yang memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanya unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*. Moeljatno sebagai penganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua aliran tersebut yakni aliran monistis beranggapan bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana telah dapat dipidana, sedangkan dalam aliran dualistis subyek hukum yang melakukan tindak pidana belum dapat dipidana apabila belum disertai kemampuan bertanggungjawab pidana yang ada pada diri pelaku.

B. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan hal vital dalam hukum pidana, terutama dalam penegakan dari tujuan hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, titik tekan utama adalah upaya preventif, yakni pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pidana sendiri adalah penderitaan yang disengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).⁶

Pertanggungjawaban pidana menjadi sangat penting dalam hukum pidana dikarenakan adanya asas “*geen straf zonder schuld*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dan asas “*leer van het materiele feit*” yang artinya pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam di pelaku tindak pidana. Namun di Indonesia sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asas “*geen straf zonder schuld*” tidak ditemukan penjelasannya mengenai apa yang dimaksud oleh asas tersebut, akan tetapi asas tersebut berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan karena adanya asas “*geen straf zonder schuld*”, keasalah ada karena adanya suatu “*strafbaar feit*” yang memiliki banyak definisi. Dengan demikian membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu, dasar adanya perbuatan pidana yakni asas legalitas sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan.⁷ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang

⁶ Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Malang: UM Press, 2001), hlm 1.

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 156

dilakukannya, yang pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.⁸

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidanakan seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan adanya sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁹

a. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁰ Pengetian kesalahan menurut Sudarto dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:¹¹

- 1) Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung maksa dapat dicelanya (*verwittbaarheid*) pembuat atas perbuatannya.
- 2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld vorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- 3) Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan seperti yang disimpulkan dalam poin b.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 68

⁹ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Volume 6, 1999, hlm 27

¹⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam hukum Pidana, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 13

¹¹ Masruchin Ruba'I, *Op.Cit*, hlm 42

Dari hal tersebut, maka adanya hubungan batin dengan suatu perbuatan yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.

b. Kesengajaan (*Dolus*)

Kesengajaan berasal dari kata sengaja, yang merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang disadari itu sebagai sifatnya sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian, *dolus* diartikan sebagai suatu niat atau itikad diwarnai sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak, maka menjadilah suatu kesengajaan. Menurut Satochid sebagaimana dikutip oleh CST. Kansil, memberikan perumusan “*opset*” sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak.¹²

Kesengajaan memiliki tiga unsur agar dapat menjadi tindak pidana, yaitu:¹³

- 1) Perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan tersebut nyata-nyatanya dan disadari adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum.
- 2) Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, maksudnya akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat itu. Akan tetapi meskipun pelaku tidak mengetahuinya, namun apabila

¹² CST Kansil, Christine ST.Kansil, *Pokok Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramit, 2004), hlm 50

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), hlm 55

keadaan atau akibat itu muncul, pelaku harus menerima resiko tersebut sebagai suatu konsekuensi.

- 3) Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Sikap batin petindak yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki dapat terwujud menjadi tiga bentuk, yakni:¹⁴

- 1) Sengaja sebagai tujuan atau arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*). Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan pelaku dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.
- 2) Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzetbij zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari delik, tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Sengaja kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzetbij mogelijkheidbewustzijn*). Artinya pelaku tahu benar tentang akibat yang akan diterima dari perbuatannya tersebut.

c. Bentuk-Bentuk Kesengajaan

- 1) Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang paling sederhana. Hal tersebut petindak memang bermaksud

¹⁴ CST Kansil, Christine ST.Kansil, *Op.Cit*, Hlm 51

menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian maka petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibat dari perbuatan itu.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan dengan sadar kepastian, disamping bertujuan mencapai akibat yang benar-benar dikehendaki terjadi pula akibat yang tidak dikehendaki yang pasti sebagai syarat untuk mencapai akibat yang dikehendaki.¹⁵

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, menyadari kemungkinan adanya akibat yang dilarang kemudian akibat itu benar-benar terjadi.¹⁶

d. Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bukan kesengajaan, namun terjadinya juga bukan merupakan suatu yang kebetulan.¹⁷ Van Hammel mengartikan kealpaan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum
- 2) Tidak mengadakan kehati-hatian seperti yang diharuskan oleh hukum.

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 14

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2010), hlm 51

¹⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 16

¹⁸ *Ibid.*

Menurut Simons kealpaan yaitu tidak adanya kehati-hatian dan tidak menduga akibatnya. Kealpaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana yakni *culpa lata*, yaitu kurang hati-hatian yang cukup besar. Ukuran untuk menentukan kealpaan demikian adalah orang pada umumnya. Sedangkan *culpa levis* yakni kealpaan ringan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Tolak ukur kealpaan ringan adalah sikap hati-hatinya yang sangat cermat. Jadi orang yang tidak berhati-hati sebagaimana orang yang sangat cermat berada dalam kealpaan ringan.

Selain kedua *culpa* tersebut terdapat juga tingkatan kealpaan yaitu: kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Dalam kealpaan yang disadari, petindak dapat membayangkan akan timbulnya akibat yang dilarang, akan tetapi dia yakin dan berusaha untuk mencegah timbulnya akibat itu. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari adalah suatu kealpaan dimana petindak sama sekali tidak menyadari kemungkinan timbulnya akibat, walaupun seharusnya dia dapat memperhitungkan kemungkinan adanya akibat yang akan muncul. Persamaan dan perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan anatar lain:¹⁹

1) Persamaan

Kesengajaan dan kealpaan, keduanya menunjuk pada arah yang keliru dari kehendak atau perasaan. Dalam teori *Finale Handling Lehre*, baik delik *dolus* yang dilakukan dengan sengaja maupun

¹⁹ Masruchin Ruba'I, *Op.Cit*, hlm 59-61

delik *culpa* yang dilakukan karena kealpaan adalah suatu perbuatan final.

2) Perbedaan

Perbedaan yang agak penting antara kesengajaan dan kealpaan yang disadari disatu pihak dengan kealpaan yang tidak disadari dilain pihak apabila diperhatikan akan terlihat perbedaan penggambaran mengenai keadaan jiwa masing-masing pembuat dari bentuk kesengajaan. Faktor kehendak yang ada pada pembuat mulai dari kehendak sebagai maksud sampai kealpaan yang disadari keadaannya semakin lemah.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:²⁰

- a. Harus adanya kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum;
- b. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Waktu terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pidana, dapat dengan dua cara yaitu:²¹

²⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 30

²¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 148-149

- a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan pasal 44 ayat (1) KUHP.²² Dari pasal 44 ayat (1) KUHP itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 ayat (1) KUHP menentukan dua keadaan kejiwaan yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan demikian orang yang mampu bertanggungjawab ialah orang yang atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) tidak terdapat dalam dua keadaan di pasal 44 ayat (1), yakni bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit demikian itulah orang mampu bertanggungjawab.
- b. Dengan tidak menghubungkan dengan norma pasal 44 ayat (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
- 1) Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga dia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang akan dilakukan;
 - 2) Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya;
 - 3) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga mampu untuk menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang

²² Pasal 44 ayat (1) KUHP: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana."

tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila yang ada.

C. Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana dalam KUHP diatur pada Buku I Bab III tentang Halhal yang Menghapuskan, Mengurangkan atau Memberatkan Pengenaan Pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik/undang-undang atau tindak pidana, tidak dipidana. Mengenai alasan penghapus pidana ini terdapat penggolongan yang berbeda-beda. Misalnya MvT membagi alasan penghapus pidana ini dalam 2 (dua) golongan, yaitu²³

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwendige droden van ontoerekenbaarheid*)
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwendige groden van ontoerekenbaarheid*)

Alasan penghapus pidana ada yang terletak di dalam KUHP dan ada pula yang terletak di luar KUHP. Alasan penghapus pidana di dalam KUHP yang dikenal dengan alasan penghapus pidana di dalam undang-Undang, terdiri dari:²⁴

1. Tidak Mampu Bertanggungjawab (Pasal 44).
2. Daya Paksa/*Overmacht* (Pasal 48)
3. PembelaanTerpaksa/*Noodweer* (Pasal 49)

²³ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja, 2013). hlm. 111

²⁴ *Ibid.*, hlm. 113

4. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang (Pasal 50)
5. Melaksanakan Perintah Jabatan (Pasal 51).

Berikut ini merupakan alasan penghapus pidana yang ada di luar Undang-Undang, maksudnya walaupun tidak diatur atau ditentukan dalam undang-undang, namun karena itu sesuai kebiasaan atau rasa keadilan, maka alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut diterima juga sebagai alasan penghapus pidana dalam praktik peradilan. Alasan penghapus pidana di luar undang-undang tersebut berikut.²⁵

1. Tidak adanya unsur sifat melawan hukum yang materil.
2. *Consent of the victim* atau ijin dar orang lain mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidana.
3. tidak ada kesalahan sama sekali.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana , yaitu :

1. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan.
2. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 129

hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidanaan

Putusan pidana karena adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dimana ada perbedaan pidana dengan perkara yang sama atau sejenis yang lebih dikenal dengan disparitas putusan. Menurut Muladi, disparitas yaitu penerapan pidana yang tidak sama atau terdapat tindak pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.²⁶

Munculnya disparitas putusan tidak lepas karena adanya kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim dalam memberikan putusan. Dimana figur hakim dalam memberikan putusan sangat berpengaruh dalam timbulnya disparitas pidanaan.

Pada konsep rancangan KUHP yang baru buku kesatu tahun 1982 memberikan pedoman pemberian pidana untuk mengurangi adanya disparitas, yang diperinci sebagai berikut: Dalam pidana hakim mempertimbangkan:²⁷

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;

²⁶ Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm 24

²⁷ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 91

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:²⁸

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Adapun adanya disparitas pemidanaan dapat dilihat dari tujuan pemidanaan yang diberikan oleh hakim, teori dan tujuan pemidanaan tidak lepas dari teori-teori yang berkembang yaitu teori absolut atau pembalasan, teori relatif atau tujuan, dan teori gabungan.²⁹ Berikut ini penjelasan dari teori-teori pemidanaan:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut atau yang dikenal dengan teori pembalasan dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan sebagai akibat telah melakukan suatu kejahatan. Andi Hamzah berpendapat bahwa:

“Teori Absolut atau pembalasan tidak bertujuan untuk memperbaiki kesalahan dari pelaku kejahatan. Kejahatan yang dilakukan itu

²⁸ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2003), hlm 25

²⁹ Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm 36

mengandung unsur dijatuhkan suatu pidana. Pidana ada karena suatu kejahatan dan tidak memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”³⁰

Berkaitan dengan teori pembalasan, Muladi dan Barda Nawawi juga berpendapat sebagai berikut:

“Pidana ada karena akibat mutlak dari adanya pembalasan dari suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi pembenaran dari pidana itu karena adanya kejahatan itu sendiri.”³¹

Jadi teori pembalasan tidak memikirkan manfaat penjatuhan pidana sehingga teori ini hanya untuk balas dendam dan tidak memikirkan nilai kemanusiaan sehingga teori ini tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan ini adalah dasar pemberian pidana untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut. Pada teori ini penjatuhan pidana mempunyai tujuan yaitu sebagai cara untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan dan untuk pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel tujuan pidana itu mempertahankan ketertiban masyarakat selain itu tujuan pidana juga untuk menakut-nakuti, memperbaiki, dan kejahatan itu harus dibinasakan.³² Grolman juga berpendapat bahwa tujuan pidana yaitu untuk

³⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)* (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm 133

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, Hlm 137

melindungi masyarakat dan untuk membuat penjahatnya jera.³³ Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk:³⁴

- a. Mencegah terjadinya suatu kejahatan;
- b. Menakut-nakuti agar orang tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki pelaku kejahatan;
- d. Memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kejahatan.

Jadi menurut teori ini adalah untuk mencegah agar ketertiban di masyarakat tidak terganggu dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan melainkan untuk menjaga ketertiban umum.

3. Teori Gabungan

Pada teori gabungan ini tujuan pidana yaitu untuk membalas kesalahan pelaku dan juga untuk melindungi masyarakat agar tercipta ketertiban. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan. Teori gabungan ini muncul karena adanya kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.

Teori gabungan pada hakekatnya lahir karena ketidak puasan teori absolut dan teori relative. Sehingga pada teori ini berusaha menciptakan keseimbangan antara teori pembalasan dan teori tujuan.

Adanya disparitas pidana menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang muncul. Akibat disparitas pidana menurut Edward M Kennedy yaitu:

- a. Memunculkan perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada;

³³ *Ibid.*

³⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm

- b. Kegagalan dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana;
- c. Mendorong munculnya suatu tindak pidana;
- d. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Akibat yang ditimbulkan dari disparitas pidana dapat kita lihat bahwa adanya disparitas pidana mempunyai dampak yang buruk bagi masyarakat dan semakin menimbulkan kekacauan di masyarakat. Masyarakat menjadi kurang simpati dengan sistem pemidanaan dan penegakan hukum yang ada. Bahkan dapat mendorong munculnya tindak pidana akibat disparitas tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 UUD NRI 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁵

Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib mengikuti, menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penilaian hakim bisa berupa dakwaan terbukti ataupun tidak terbukti. Putusan hakim ini sangat penting karena mempunyai kekuatan hukum sehingga setiap orang terkait harus mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut.

Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang kemudian dijadikan dasar untuk mengadili suatu perkara.

F. Tinjauan Umum Tentang Skizofrenia

1. Pengertian Skizofrenia

Skizofrenia berasal dari dua kata, yaitu “*Skizo*” yang artinya retak atau pecah (*split*), dan “*Frenia*” yang berarti jiwa. Dengan demikian seseorang yang menderita gangguan jiwa Skizofrenia adalah orang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian (*splitting of personality*).³⁶

Menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III) skizofrenia merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan

³⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, TLN 5076

³⁶ Dadang Hawari, *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia* (Jakarta: FKUI, 2009), hlm 10

perjalanan penyakit yang luas, tak selalu bersifat kronis, dan tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya.

Skizofrenia merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Sebelum Kraepelin tidak ada satupun pendapat mengenai berbagai gangguan jiwa yang sekarang dinamakan skizofrenia. Gangguan skizofrenia adalah sekelompok reaksi psikotik yang mempengaruhi area fungsi individu, termasuk berpikir dan berkomunikasi, menerima, dan menginterpretasikan realitas, merasakan dan menunjukkan emosi, dan berperilaku dengan sikap yang dapat diterima secara sosial.³⁷ Menurut Kraepelin pada penyakit ini terjadi kemunduran intelegensi sebelum waktunya; sebab itu dinamakannya *demensia* (kemunduran intelegensi) *precox* (muda, sebelum waktunya).³⁸

Berdasarkan teori diatas maka dapat disimpulkan pengertian skizofrenia adalah gangguan jiwa menetap, bersifat kronis, dan bisa terjadi kekambuhan dengan gejala psikotik beranekaragam dan tidak khas seperti penurunan fungsi kognitif yang disertai halusinasi dan waham, afek datar, disorganisasi perilaku dan memburuknya hubungan sosial.

2. Tanda dan Gejala Skizofrenia

Perjalanan gangguan jiwa skizofrenia dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Fase Prodromal

Biasanya timbul gejala-gejala non spesifik yang lamanya bisa minggu, bulan, ataupun lebih dari satu tahun sebelum onset psikotik menjadi

³⁷ Ann Isaacs, *Panduan Belajar: Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikiatri edisi 3* (Jakarta: EGC, 2004), hlm 23

³⁸ H.I. Kaplan dan B.J. Sadock, *Sinopsis Psikiatri Jilid 2, edisi VII* (Jakarta: Binarupa Aksara, 2010), hlm 50

jelas. Gejala tersebut meliputi: hendaya fungsi pekerjaan, fungsi sosial, fungsi penggunaan waktu luang, dan fungsi perawatan diri. Perubahan-perubahan ini akan mengganggu individu serta membuat resah keluarga dan teman. Semakin lama fase prodromal maka semakin buruk prognosisnya.

b. Fase Aktif

Gejala positif/psikotik menjadi jelas seperti tingkah laku katatonik, inkoherensi, waham, atau halusinasi disertai dengan gangguan afek. Hampir semua individu datang berobat pada fase ini, bila tidak mendapat pengobatan gejala-gejala tersebut dapat hilang spontan suatu saat mengalami eksasebasi atau terus bertahan. Fase aktif akan diikuti oleh fase residual.

c. Fase Residual

Gejala-gejala fase ini sama dengan fase prodromal tetapi gejala positif/psikotiknya sudah berkurang. Disamping gejala-gejala yang terjadi pada ketiga fase diatas, penderita skizofrenia juga mengalami gangguan kognitif berupa gangguan berbicara spontan, mengurutkan peristiwa, kewaspadaan dan eksekutif (atensi, konsentrasi, hubungan sosial).

Sedangkan menurut Bleuler, gejala skizofrenia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

a. Gejala primer

Gejala primer terdiri dari gangguan proses berpikir, gangguan emosi, gangguan kemauan, serta autisme.

b. Gejala sekunder

Gangguan sekunder terdiri dari waham, halusinasu, dan gejala katatonik maupun gangguan psikomotor yang lain.

3. Jenis Skizofrenia

a. Skizofrenia simpleks

Skizofrenia simpleks, sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala utama ialah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Gangguan proses berfikir biasanya sukar ditemukan. Waham dan halusinasi jarang sekali terdapat. Jenis ini timbul secara perlahan yang pada permulaan mungkin penderita kurang memperhatikan keluaeganya atau menarik diri dari pergaulan. Makin lama ia semakin mundur dalam pekerjaan atau pelajaran dan pada akhirnya menjadi pengangguran dan bila tidak ada orang yang menolongnya mungkin ia akan menjadi pengemis, pelacur, atau penjahat.³⁹

b. Skizofrenia Hebefrenik

Skizofrenia hebefrenik atau disebut juga hebefrenia, menurut Maramis permilaannya perlahan-lahan dan sering timbul pada masa remaja atau antara 15-25 tahun.⁴⁰ Gejala yang mencolok adalah gangguan pada proses berfikir, gangguan kemauan, dan adanya depersonalisasi. Gangguan psikomotor seperti perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada jenis ini. Waham dan halusinasi banyak sekali.

³⁹ W.F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), hlm 38

⁴⁰ Ibid, hlm 40

c. Skizofrenia Katatonik

Menurut Maramis, skizofrenia katatonik atau disebut juga katatonia, timbulnya pertama kali antara umur 15-30 tahun dan biasanya akut serta sering didahului oleh stress emosional. Mungkin terjadi gaduh gelisah katatonik atau stupor katatonik.⁴¹

1) Stupor Katatonik

Pada stupor katatonik, penderita tidak menunjukkan perhatian sama sekali terhadap lingkungannya dan emosinya sangat dangkal. Secara tiba-tiba atau perlahan-lahan penderita keluar dari keadaan stupor ini dan mulai berbicara dan bergerak.

2) Gaduh Gelisah Katatonik

Pada gaduh gelisah katatonik, terdapat hiperaktivitas motoric, tetapi tidak disertai dengan emosi yang semestinya dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar.

d. Skizofrenia Paranoid

Jenis ini berbeda dari jenis-jenis lainnya dalam perjalanan penyakit. Hebefrenia dan katatonia sering lama-kelamaan menunjukkan gejala-gejala skizofrenia simplek atau gejala campuran hebefrenia dan katatonia.⁴² Tidak demikian halnya dengan skizofrenia paranoid yang jalannya agak konstan.

⁴¹ Ibid, hlm 42

⁴² Ibid, hlm 44

e. Skizofrenia Akut

Gejala skizofrenia ini timbul mendadak sekali dan pasien seperti keadaan mimpi.⁴³ Kesadarannya mungkin berkabut. Dalam keadaan ini timbul perasaan seakan-akan dunia luar dan dirinya sendiri berubah. Semuanya seakan-akan mempunyai arti yang khusus baginya. Prognosisnya baik dalam waktu beberapa minggu atau biasanya kurang dari enam bulan penderita sudah baik. Terkadang bila kesadaran yang berkabut tadi hilang, maka timbul gejala-gejala salah satu jenis skizofrenia yang lainnya.

f. Skizofrenia Residual

Skizofrenia residual, merupakan keadaan skizofrenia dengan gejala-gejala primer seperti yang dikemukakan oleh Bleuler, tetapi tidak jelas adanya gejala-gejala sekunder.⁴⁴ Keadaan ini timbul sesudah beberapa kali serangan skizofrenia.

g. Skizofrenia Skizoafektif

Pada skizofrenia skizoafektif, disamping gejala-gejala skizofrenia terdapat menonjol secara bersamaan, juga gejala-gejala depresi atau gejala-gejala mania.⁴⁵ Jenis ini cenderung menjadi sembuh tanpa efek, tetapi mungkin juga timbul lagi serangan.

⁴³ Ibid, hlm 48

⁴⁴ Ibid 51

⁴⁵ Ibid 57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴⁶ Metode penelitian normatif merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dengan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum dengan objek yang digunakan hukum itu sendiri.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁴⁸ Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang berisi atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh pengidap gangguan kejiwaan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

⁴⁶ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm 295

⁴⁷ Jonny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 57

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 23

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm 137

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penulis dalam pendekatan kasus yaitu dengan mengumpulkan putusan-putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pengidap gangguan kejiwaan. Pada pendekatan kasus ini penulis perlu memahami tentang ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.⁵⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.⁵¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pasal 44, Pasal 351 ayat (1), dan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 3 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016
- d. Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017

⁵⁰ *Ibid*, hlm 158

⁵¹ *Ibid*, hlm 141

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru mengenai fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).⁵² Buku teks merupakan salah satu bahan hukum sekunder karena berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵³ Literatur-literatur yang terkait permasalahan inilah yang masuk kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, antara lain:

- a. Buku-buku hasil penelitian dan makalah
- b. Pendapat serta doktrin para sarjana
- c. Literatur terkait yang diperoleh dari perpustakaan umum kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- d. Artikel internet

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik memperoleh bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian yuridis normatif ini diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi yang digunakan dalam ilmu hukum

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 29

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 142

dogmatic. Penulis dalam penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal. Interpretasi sistematis merupakan penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang yang lain.

Interpretasi gramatikal memberikan makna atau penjelasan terhadap suatu objek dengan cara menguraikannya dengan bahasa. Metode interpretasi gramatikal disebut juga metode penafsiran objektif yaitu dengan menjelaskan ketentuan undang-undang dan menguraikan dengan bahasa susunan kata dan bunyinya.

F. Definisi Konseptual

1. Disparitas Putusan

Merupakan perbedaan putusan pembedaan yang diberikan oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama.

2. Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan jiwa menetap, bersifat kronis, dan bisa terjadi kekambuhan dengan gejala psikotik beranekaragam dan tidak khas seperti penurunan fungsi kognitif yang disertai halusinasi dan waham, afek datar, disorganisasi perilaku dan memburuknya hubungan sosial.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Pengidap Gangguan Kejiwaan

Hakim merupakan pejabat peradilan yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hukum untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.⁵⁴ Hakim disebut juga sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman memperoleh kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas dari intervensi pihak manapun. Namun suatu permasalahan pun akan timbul jika terjadi perbedaan putusan yang berbeda jauh yang diberikan oleh hakim dimana terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai kondisi kejiwaan dari terpidana sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh ahli.

Seperti kedua putusan pengadilan militer yang saat ini penulis bahas. Adanya perbedaan putusan yang diberikan oleh hakim menimbulkan banyak problema yang terjadi baik dari sisi pelaku, korban maupun masyarakatnya. Perbedaan putusan tersebut dalam istilah hukum disebut dengan disparitas. Disparitas pidana ini membawa problematika tersendiri dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Pemidanaan yang berbeda atau dapat dikatakan juga terkait disparitas pidana merupakan suatu bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, tapi pemidanaan yang berbeda ataupun disparitas

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm 80

pidana ini membawa ketidakpuasan bagi para pihak karena hal tersebut menimbulkan kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat umum terhadap institusi penegak hukum, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpercayaan kepada penegakan hukum di Indonesia.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki tujuan yang berbeda-beda. Secara tidak langsung hal tersebut juga dapat menjadi penyebab adanya disparitas putusan yang diberikan oleh hakim. Sistem peradilan pidana di Indonesia yang memberikan kebebasan yang luas kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana menjadi salah satu faktor banyaknya disparitas penjatuhan pidana dalam peradilan di Indonesia.

Namun demikian kebebasan tersebut haruslah dibatasi dengan adanya sistem pembuktian negatif yang dianut oleh Indonesia dimana selain berdasarkan keyakinan hakim, juga harus didukung dengan alat bukti yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan dalam persidangan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.

Indonesia juga menganut asas *equality before the law* yang bermakna bahwa semua manusia mendapatkan persamaan dihadapan hukum yakni suatu kesetaraan hukum yang sama antar setiap individu, dimana hal tersebut menjamin adanya kepastian hukum yang bermuara pada keadilan bagi semua pihak.

Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa: “Terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban terhadap (judicial caprice) yakni akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan

salah satu target dalam tujuan pemidanaan”.⁵⁵Dari ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab hal ini merupakan suatu indicator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia.

1. Posisi Kasus

- a. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

Kopda Khotibul Umam sering mengunjungi Ruko Blok D No. 41 Pasal Induk Caringin Bandung milik korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang berusaha kedai kopi dan tempat bilyard. Setiap kali datang ke tempat korban, terpidana selalu mengambil barang dan kemudian menyuruh pelanggan yang datang untuk membayarnya. Hal tersebut membuat para pelanggan menjadi enggan untuk datang lagi ke tempat tersebut karena merasa ketakutan dengan perlakuan dan ancaman dari terpidana. Karena ruko tempat usahanya menjadi sepi, korban kemudian menegur terpidana untuk tidak lagi datang ke ruko tempatnya karena hal kedatangannya membuat rukonya sepi. Pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015, terpidana mendatangi korban dan kemudian menusuk leher korban dengan pisau yang dibawanya. Korban yang kesakitan kemudian memanggil ibunya untuk menunjukkan luka tusukan tersebut yang membuat ibu korban histeris dan kemudian bertanya kepada terpidana namun tidak dihiraukannya. Ibu korban

⁵⁵ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm 54

kemudian meminta bantuan dari orang-orang disekitar dan kemudian korban dibawa ke RS Imanuel Bandung dan kemudian dinyatakan meninggal dan dibawa ke RS Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan otopsi. Saat petugas kepolisian mendatangi lokasi terpidana sudah tidak berada di tempat kejadian, kemudian ada seorang pedagang yang memberi tahu bahwa terpidana berada di Pemakaman sekitar Gang Porib. Petugas kepolisian kemudian mendatangi lokasi dimana terpidana berada dan kemudian membawa terpidana ke Mapolsek Ciparay tanpa perlawanan. Dalam persidangan yang berlangsung, beberapa saksi menyatakan bahwa terpidana sering melakukan hal-hal aneh seperti mencoret-coret dinding atau tiang listrik dengan tulisan arab dan pernah mendatangi pasar hanya menggunakan celana dan mengikat kepalanya dengan bajunya kemudian meminta uang kepada pedagang disekitar. Keterangan tersebut dikuatkan dengan bukti *Visum Et Repertum Psikiatrik* Nomor B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K) yang menyatakan bahwa terpidana menderita gangguan kejiwaan jenis skizofrenia.

Oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Letkol Nanik Suwarni, S.H., M.H., terpidana dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari karena terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati (Pasal 351 ayat (3) KUHP).

- b. Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017

Kejadian bermula pada saat Terpidana Serka Marinir Bambang Susilo melintas di depan warung milik Bu Endang setelah pulang kerja, terpidana merasa ada yang meneriakinya sehingga berhenti diwarung tersebut. Pada saat itu korban yang bernama Imam Subali datang ke warung yang sama bersama dengan anak dan istrinya untuk membeli makan siang. Terpidana merasa bahwa korbanlah yang meneriaki dirinya sehingga terpidana menegur dengan cara mendorong bahu korban menggunakan helm yang sebelumnya digunakan oleh terpidana, namun karena korban tidak merasa meneriaki terpidana maka korban diam saja. Karena merasa sakit hari tidak dihiraukan oleh korban, terpidana kemudian memukul terpidana dibagian rahang bawah sebelah kiri, dan kemudian terpidana mengeluarkan pisau sangkur dan berusaha untuk menusuk korban dibagian perut namun dapat ditepis oleh korban yang mengakibatkan tangan kiri korban terluka dan akhirnya terpidana memukul kepala korban menggunakan bagian gagang dari sangkur tersebut. Karena merasa nyawanya terancam, korban lari ke Balai Desa Pademonegoro yang tempatnya tidak jauh dari tempat kejadian untuk menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada perangkat desa dan Babinsa Sukodono yaitu Pelda Dodik Armanto yang kebetulan berada di balai desa. Saat korban lari ke balai desa, terpidana meninggalkan tempat kejadian.

Setelah mendapat laporan dari korban, korban bersama perangkat desa, babinsa dan teman korban pergi ke rumah terpidana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setibanya di rumah terpidana, terpidana justru marah-marah dan melakukan pemukulan kembali kepada korban disertai ancaman akan membunuh korban. Karena emosi korban pulang kerumah untuk mengambil arit dan kembali kerumah terpidana dengan kakak korban yang membawa linggis, namun ditengah jalan dicegah oleh keamanan desa yang kemudian menyarankan kepada korban untuk melaporkan ke Polsek Sukodono yang kemudian dituruti oleh korban. Selanjutnya korban dan terpidana diminta untuk datang ke Koramil Sukodono untuk dilakukan mediasi, namun pihak dari korban tidak mau diselesaikan secara kekeluargaan sehingga korban bersama saksi-saksi mendatangi Pomal Lantamal V untuk melaporkan perbuatan dari terpidana. Dalam persidangan terpidana mengajukan ahli yaitu dr. Imam Santoso SpKj yang bertugas di Poli Psikiatri Rumkital Dr. Ramelan. Ahli dalam keterangannya menyampaikan bahwa terpidana mengidap gangguan kejiwaan jenis skizofrenia.

Majelis hakim yang diketuai oleh Letkol Laut Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H., menyatakan bahwa terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”. Namun majelis hakim melepaskan terpidana dari tuntutan oditur militer, disebabkan terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan kejiwaan.

Berikut akan penulis jelaskan dalam bentuk tabel persamaan dari kedua putusan tersebut:

Tabel 4.1

**Persamaan Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dengan
Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017**

No.	Persamaan Putusan	Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016	Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017
1	Status Terpidana	Terpidana merupakan anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara terpidana masih berdinis aktif serta bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda dengan NRP 31980191050676	Terpidana menjadi anggota TNI AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Pusdikmar Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonbekpal-1 Mar, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara terpidana masih berdinis aktif serta bertugas di Puslatpasrat dengan pangkat Serka dengan NRP 73473
2	Kondisi Kejiwaan Pelaku	Terpidana adalah penderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia yang dibuktikan dengan <i>Visum Et Repertum Psikiatrik</i> Nomor B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat SpKj (K)	Terpidana adalah penderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia yang dibuktikan dengan Laporan Medik/Psikatri Penderita dari Rumkital Dr.Ramelan An. Sertu Mar. Bambang Susilo

3	Riwayat Tindak Pidana	Baru sekali melakukan tindak pidana	Baru sekali melakukan tindak pidana
---	-----------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Sumber: Putusan Bahan Hukum Primer, diolah Mei 2018.

Menurut analisis penulis tentang kedua putusan tersebut yang didalamnya memiliki beberapa macam persamaan terkait kedua putusannya antara lain adalah mengenai status dari terpidana, kondisi kejiwaan dari terpidana, dan riwayat tindak pidana dari para terpidana. Dari ketiga persamaan tersebut, masih terdapat perbedaan atau disparitas mengenai putusan hakim. Jika melihat dari segi perbedaan kedua putusan yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikutnya, maka memang persamaan ini tidak menjamin jika kedua putusan ini akan sama. Semua akan kembali pada pertimbangan yang dimiliki oleh masing-masing hakim. Berikut akan dijelaskan dalam bentuk tabel perbedaan dari kedua putusan tersebut:

Tabel 4.2

**Perbedaan Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dengan
Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017**

No.	Perbedaan Putusan	Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016	Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017
1	Jenis Surat Dakwaan	Dakwaan Subsidiar	Dakwaan Tunggal
2	Penilaian hakim terhadap kondisi kejiwaan terpidana	Majelis hakim yang memutus perkara ini menilai bahwa keterangan Ahli yang menyatakan bahwa terpidana menderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana perlu	Majelis hakim yang memutus perkara ini menggunakan keterangan ahli yang menyatakan bahwa terpidana menderita gangguan jiwa berat jenis Skizofrenia sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan majelis

		dikesampingkan karena berdasarkan pertimbangan hakim bahwa hakimlah yang berhak untuk menilai kondisi kejiwaan dari terpidana yang hal tersebut sesuai dengan doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya oleh Van Hamel, Simons, dan Pompe.	hakim menilai hal tersebut sebagai suatu alasan pemaaf yang sesuai dengan pasal 44 ayat (1) KUHP.
3	Amar putusan	Menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.	Melepaskan terpidana dari tuntutan oditur militer, disebabkan terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa.

Sumber: Putusan Bahan Hukum Primer, diolah Mei 2018

Dari tabel perbedaan dari kedua putusan yang sudah dibuat oleh penulis, penulis berpendapat bahwa ketiga hal diatas merupakan perbedaan yang mendasar yang membedakan kedua putusan. Perbedaan penafsiran pasal 44 KUHP yang dilakukan oleh kedua majelis hakim menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kondisi kejiwaan dari terpidana. Pada hal ini penulis berfokus pada perbedaan pertimbangan hakim dalam menilai kondisi kejiwaan terpidana dari keterangan yang disampaikan oleh ahli karena hal tersebut merupakan faktor utama atau dasar pertimbangan utama yang menyebabkan kedua putusan ini berbeda atau menyebabkan terjadinya disparitas.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

- a. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung
Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

Majelis hakim dalam amar putusan nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 menyatakan bahwa:

- 1) Menyatakan Terpidana tersebut di atas yaitu: Khoirul Umam, Kopda (Purn) NRP. 31980191050676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan mati”.

- 2) Mempidana Terpidana oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 3) Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang:

- a) 1 (satu) bilah pisau dapur.
- b) 1 (satu) buah topi.
- c) 1 (satu) pasang sandal plastik warna biru putih merk Adidas.
- d) 1 (satu) potong kaos putih.
- e) 1 (satu) potong celana jeans warna biru berikut ikat pinggang.
- f) 1 (satu) buah karton/dus.
- g) 2 (dua) buah gelas plastik

Dirampas untuk dimusnahkan.

- h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat

- a) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.
- b) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum Nomor R/VeR/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr M Ihsan Wahyudi, Sp., STR No.33.1.1.607.2.1.047579.
- c) 25 (dua puluh lima) lembar hasil pemeriksaan kejiwaan/Visum Et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr Teddy Hidayat, SpKj (K).
- d) 2 (dua) lembar fotokopi surat hasil pemeriksaan keswa Terpidana Nomor: R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Terpidana sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5) Memerintahkan Terpidana tetap ditahan.

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim pasti memiliki alasan atau dasar pertimbangan yang digunakan untuk mengambil putusan tersebut, diantaranya:

- 1) Bahwa atas perbuatan terpidana tersebut, korban Indra Wanta Tarigan kehilangan nyawanya.⁵⁶
- 2) Bahwa ketika Ahli melakukan wawancara dengan terpidana juga menanyakan mengenai kasusnya Terpidana menjawab bahwa Terpidana merasa sakit hati karena sebelum kejadian pernah dilarang oleh Korban sehingga Terpidana merasa tersinggung.⁵⁷
- 3) Terpidana mengakui telah melakukan penusukan kepada korban dan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang dan korban akan merasakan sakit bahkan dapat mengakibatkan kematian.
- 4) Terpidana merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan selanjutnya akan berobat.
- 5) Bahwa terhadap keterangan Ahli yang menerangkan bahwa Terpidana mengalami gangguan kejiwaan Skizofrenia majelis hakim memandang perlu mengkaji keadaan pada diri terpidana pada waktu melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan ahli.

Selain itu untuk mengetahui gangguan kejiwaan yang dialami terpidana dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, majelis hakim menggunakan dua pendekatan yaitu melalui ilmu pengetahuan hukum pidana dan kedua melalui realitas keadaan terpidana yang diperoleh di persidangan.

⁵⁶ Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

⁵⁷ Ibid. hlm 31

1) Pendekatan ilmu pengetahuan hukum pidana

Pasal 44 ayat (1) KUHP mengatur bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit tidak pidana”. Bahwa keadaan jiwa sebagai syarat utama dalam penerapan hukum pidana dihubungkan dengan dapat atau tidaknya pelaku tindak pidana dipidana atau dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dapat diterangkan melalui pendapat ahli hukum pidana sebagai berikut:

Van Hamel berpendapat:

Bahwa untuk memberlakukan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP itu, orang harus memperhatikan “*iedere storing door ziekte*” atau “setiap gangguan karena penyakit”. Adanya sesuatu gangguan penyakit pada saat sesuatu perbuatan itu dilakukan tidaklah mencukupi rumusan undang-undang. Undang-undang mensyaratkan bahwa antara gangguan penyakit dengan sesuatu perbuatan itu terdapat hubungan hingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Tentang ada atau tidaknya “*toerekeningsvatbaarheid*” atau dapat dipertanggungjawabkan secara pidana” yang pada hakikatnya merupakan suatu pengertian yuridis itu, pada akhirnya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP hakimlah yang harus menentukannya.⁵⁸

⁵⁸ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hlm 402

Selanjutnya Simons berpendapat:

Bahwa tidak setiap gangguan penyakit pada kemampuan jiwa seseorang itu dapat meniadakan “*toerekeningsvatbaarheid*” dari orang tersebut, akan tetapi hakim bebas untuk menentukan apakah karena gangguan tersebut “*toerekeningsvatbaarheid*” dari seseorang harus dianggap sebagai tidak ada ataupun sebaliknya.⁵⁹

Di dalam usaha untuk mengambil keputusan tentang ada atau tidaknya “*toerekeningsvatbaarheid*” dari seseorang pelaku itu, hakim harus memperhatikan kenyataan, yaitu sampai seberapa jauh gangguan penyakit itu mempunyai pengaruh terhadap keadaan psikis dari pelaku, dan harus mempertimbangkan apakah pengaruh tersebut adalah demikian rupa hingga pelakunya itu menjadi tidak mampu untuk menyadari tentang arti dari perbuatannya itu atau tidak, dan sesuai dengan kesadarannya itu juga mampu untuk menentukan apa yang ingin ia lakukan maupun tidak.

Sementara itu Pompe berpendapat:

Apakah ada cukup alasan untuk menganggap bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu kurang sempurna pikirannya atau tidak sehat ingatannya hakimlah yang akan memutuskannya.⁶⁰ Pertimbangan sudah tentu akan meminta pertimbangan dan pendapat seorang ahli jiwa, akan tetapi hakimlah yang akan menetapkan. Sebab walaupun menuntut pemeriksaan ahli jiwa orang itu harus dianggap tidak sempurna keadaan rohaninya, tetapi

⁵⁹ Ibid. hlm 403

⁶⁰ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 23

pokok persoalannya terletak kepada apakah ada hubungannya diantara keadaan jiwa orang itu dengan perbuatannya. Dan tentang hal itu hanya hakimlah yang berwenang memutuskannya, seseorang yang dihinggapai penyakit kleptomani misalnya tidak dapat dilepaskan dari penghukuman jika ia membunuh orang. Diantara keadaan jiwanya, sebagai seorang yang berpenyakit kleptomani tidak ada hubungannya dengan perbuatan membunuh.

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dalam hal seorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa perlu dipertimbangkan bahwa keadaan jiwa seseorang yang diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1) KUHP bersifat yuridis bukan medis, atau dengan kata lain walaupun telah ada keterangan ahli tentang keadaan jiwa seseorang pelaku tindak pidana yang terganggu tidak serta merta bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2) Pendekatan dari sisi Fakta Hukum

Dari beberapa fakta yang didapat dipersidangan seperti terpidana mengakui telah melakukan penusukan pada bagian leher sebelah kanan korban menggunakan pisau yang diambil dari kios buah-buahan, terpidana melakukan tersebut berawal dari rasa sakit hati dan terpidana melakukan hal tersebut pada saat keadaan pasar sedang sepi, terpidana menyesal telah melakukan tersebut dan terpidana berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Dari kedua pendekatan diatas yaitu pendekatan ilmu hukum pidana yang kemudian dihubungkan dengan pendekatan dari sisi fakta hukum perbuatan dari terpidana terlihat bahwa benar sesuai dengan keterangan ahli bahwa terpidana mengalami penyakit skizofrenia karea gangguan ini terpidana tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas, namun keadaan penyakit itu tidak berhubungan langsung dengan perbuatan terpidana. Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lain yaitu (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.⁶¹

Dari ketiga kriteria sebagaimana disebutkan diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum perbuatan terpidana adalah: (1) terpidana dalam melakukan tindak pidana terlihat mengerti dan memahami apa yang terpidana lakukan dan sasarannya, mengerti dan memahami arah dan tujuan dari tindakannya; (2) terakwa mengambil pisau dalam keadaan yang sadar karena terpidana dapat melihat dan mengarahkan sasaran tusukan pada leher korban yang menyebabkan korban mengalami luka yang kemudian meninggal dunia, selain itu terpidana juga mengerti bahwa perbuatannya bertentangan dengan norma hukum.

⁶¹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 213

Dari uraian-uraian diatas menjadi dasar pertimbangan hakim bahwa tidak terlihat adanya hubungan penyakit skizofrenia dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana atau dengan kata lain terpidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Di dalam KUHP tidak terdapat rumusan atau ketentuan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan yang selanjutnya penganiayaan ini oleh doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.⁶² Selanjutnya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 351 ayat (3) KUHP menurut majelis hakim adalah:

1) Unsur Barangsiapa

Menurut undang-undang yang diartikan dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5,7, dan 8 KUHP) termasuk juga diri terpidana sebagai anggota TNI sesuai fakta persidangan sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kesatu yaitu barangsiapa telah terpenuhi.

Menurut penulis unsur barangsiapa ini pasti terpenuhi karena unsur ini mengarah pada subyek hukum yang melakukan tindak pidana maka dari itu pasti mengarah pada terpidana.

2) Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka Kepada Orang Lain

⁶² Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

Menurut *Memori van Toelithing* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya yang dapat diartikan pula adanya maksud terpidana untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Ditinjau dari sifatnya, kesengajaan dibagi menjadi:

- a) Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/terpidana.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si pelaku atau terpidana tentang tindakan dan akibat tertentu yang dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/terpidana tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/terpidana. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan

tidak enak kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka yang dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak, dan sebagainya. Mengenai pengertian sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat dalam badan manusia.

Dari fakta persidangan majelis hakim berpandangan bahwa terpidana telah dengan sadar melakukan penganiayaan kepada korban karena didasari rasa sakit hati karena dilarang membeli dan datang ke warung milik korban dan terpidana mengetahui bahwa perbuatannya melanggar dan dapat mengakibatkan orang lain luka-luka. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim memperhatikan fakta bahwa terpidana menderita gangguan kejiwaan jenis skizofrenia yang dibuktikan dengan Visum et Repertum No. 26/146/I/2016. Ahli menyampaikan bahwa terpidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena ketika melakukan penusukan kepada korban, terpidana tidak menyadari apa yang dilakukannya sehingga unsur kesengajaan dalam hal ini masih perlu untuk dibuktikan kembali.

3) Unsur Jika Mengakibatkan Mati

Bahwa unsur mengakibatkan mati berarti matinya korban bukan merupakan kehendak dari si pelaku atau terpidana, akan tetapi kematian korban merupakan akibat dari tindakan terpidana. Terpidana sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan akibat dari tindakan pelaku yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pelaku/terpidana.

Pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak adanya denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya. Kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan bahwa pelaku melakukan penusukan kepada korban di bagian leher sebelah kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia/mati yang dibuktikan dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/VeR/60/XII/2015/Dokpol. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu jika mengakibatkan mati telah terpenuhi.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan majelis hakim bahwa sesuai dengan fakta apa yang dilakukan terpidana yaitu melakukan penusukan kepada korban mengakibatkan korban meninggal dunia/mati yang sebenarnya akibat tersebut tidak dikehendaki oleh terpidana.

Menurut analisis penulis didalam dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali. Seperti kondisi kejiwaan yang dialami oleh terpidana dimana dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa kondisi kejiwaan terpidana yang dinyatakan mengidap gangguan kejiwaan jenis skizofrenia tidak berhubungan langsung dengan perbuatan terpidana yang melakukan penusukan kepada korban yang mengakibatkan kematian. Hakim menilai keadaan dimana terpidana melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan amarahnya dan terpidana merasa dipengaruhi oleh rasa pusing di kepalanya serta dari kepala bagian atas terpidana merasa seperti ada yg keluar berupa sinar warna putih dan kuning dan terpidana selalu mendengar ada suara yang membisikan di telinganya untuk melakukan pembunuhan kepada seseorang dan melihat makhluk halus berwujud leak, hal tersebut dinilai oleh hakim sebagai bentuk lemahnya iman dan taqwa dari terpidana. Dari hasil Visum et Repertum Psikiatrik terpidana, ahli menyatakan:

- 1) Terpidana ketika melakukan penusukan tersebut dalam keadaan sadar, namun pengertian sadar menurut ahli tidak sama dengan pengertian sadar menurut masyarakat pada umumnya, sadar menurut ahli adalah *KOMPOS MENTIS*.⁶³

⁶³ Ahmad Muhlisin, *Penilaian Tingkat Kesadaran (Nilai GSC) Dewasa dan Anak*, <https://mediskus.com/dasar/penilaian-tingkat-kesadaran-berdasarkan-nilai-gcs>, diakses 2 Mei 2018

- 2) Bahwa kemudian kesadaran tersebut dihubungkan dengan perbuatan terpidana yang saat itu melakukan tindakan penusukan terhadap korban maka terpidana dalam keadaan *kompos mentis* tetapi tindakan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena diluar kendalinya yaitu gejala-gejala wahana halusinasi. Sehingga dalam kondisi ini terpidana tidak mampu untuk membedakan antara fantasi dan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti pada orang normal.
- 3) Ahli menyimpulkan bahwa pada saat melakukan penusukan terpidana dipengaruhi oleh gangguan pada pikirannya tidak dapat dikendalikannya. Ahli menyarankan agar terpidana menjalani perawatan dan pengobatan secara intensif karena dikhawatirkan jika tidak dilakukan perawatan dan pengobatan secara intensif maka terpidana bisa mengancam jiwa orang lain lagi bahkan bisa terulang melakukan penusukan yang lebih hebat atau jatuh korban yang lebih banyak.

Berdasarkan Glasgow Coma Scale (GSC) tingkat kesadaran dibedakan menjadi beberapa tingkat yaitu: 1)Composmentis, yaitu kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik.2)Apatis, yaitu kondisi seseorang yang tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. 3)Delirium, yaitu kondisi seseorang yang mengalami kekacauan gerakan, siklus tidur bangun yang terganggu dan tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi serta meronta-ronta. 4)Somnolen, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk namun masih dapat sadar bila dirangsang, tetapi bila rangsangan berhenti akan tertidur kembali. 5)Sopor, yaitu kondisi seseorang yang mengantuk yang dalam, namun masih dapat dibangunkan dengan rangsangan yang kuat, misalnya rangsang nyeri, tetapi tidak terbangun sempurna dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. 6)Semi-coma, yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respons terhadap pertanyaan, tidak dapat dibangunkan sama sekali, respons terhadap rangsang nyeri hanya sedikit, tetapi reflex kornea dan pupil masih baik. 7)Coma, yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, memberikan respons terhadap pertanyaan, tidak ada gerakan, dan tidak ada respon terhadap rangsangan nyeri.

Berdasarkan uraian diatas menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dalam pasal 183 disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Dalam hal ini alat bukti yang terdapat dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat (Visum Et Repertum). Selain dua alat bukti yang sah hakim harus memiliki keyakinan bahwa terdakwa bersalah yang dalam hal ini hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer dan hakim berpendapat tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana dari terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” dan karena hakim telah memenuhi ketentuan dari pasal 193 ayat (1) maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

- b. Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017
- Majelis Hakim dalam amar putusan nomor 109-K/PM.III-12/AL/2017 menyatakan bahwa:

- 1) Menyatakan terpidana tersebut diatas yaitu: Bambang Susilo, Serka Mar NRP 73473 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penganiayaan”.
- 2) Melepaskan terpidana dari tuntutan Oditur Militer, disebabkan terpidana tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mengalami gangguan jiwa.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Barang-barang:
 - i. 1 (satu) buah sangkur warn hijau dengan bercak-bercak hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ii. 1 (satu) buah helm warna biru
Dikembalikan kepada Serka Mar Bambang Susilo.
 - b) Surat-surat
 - i. 2 (dua) lembar Visum et Repertum Nomor 46/VIS/RSAl/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya atas nama Sdr. Imam Subali (Saksi-1) yang ditandatangani oleh dr. Fakhri.
 - ii. 2 (dua) lembar Laporan medik/psikiatri penderita dari Rumkital Dr. Ramelan An. Sertu Mar Bambang Susilo
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4) Membebankan biaya perkara kepada Negara.
- 5) Memerintahkan agar terpidana dilakukan pengobatan dan observasi medis di Rumah Sakit Jiwa selama waktu 6 (enam) bulan.

Dalam amar putusan tersebut, majelis hakim pasti memiliki alasan atau dasar pertimbangan yang digunakan untuk mengambil putusan tersebut, diantaranya:

- 1) Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh para saksi saling berhubungan dan memiliki kesesuaian satu sama lainnya.
- 2) Bahwa bantahan yang diberikan oleh terpidana dalam menanggapi keterangan yang diberikan oleh para saksi, oleh majelis hakim hal tersebut dikesampingkan.
- 3) Dari proses persidangan dapat ditemukan fakta bahwa terpidana secara sadar dan jelas mengingat semua kejadian penganiayaan yang dilakukan kepada korban.
- 4) Dalam keterangannya, ahli dr. Imam SpKj menyimpulkan bahwa terpidana mengalami gangguan jiwa berat jenis skizofrenia yang dimana orang biasa jika mendapat teriakan yang tidak jelas maka akan membiarkannya, namun karena terpidana memiliki gangguan jiwa maka akan langsung marah. Dari keterangan yang diberikan oleh saksi yang melihat kejadian atau berada di tempat kejadian jelas tidak ada yang menyatakan bahwa korbanlah yang meneriaki terpidana hingga terpidana tersulut emosi.

Dalam dakwaannya, oditur militer mendakwa terpidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang dimana didalamnya tidak terdapat uraian unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Oleh karenanya majelis hakim menjabarkan unsur-unsur penganiayaan sebagai berikut:

1) Unsur Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2-5, dan 7 KUHP.

Dalam hal ini terpidana merupakan anggota TNI yang otomatis merupakan warga negara republic Indonesia (WNI) yang tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya unsur barangsiapa menurut majelis hakim telah terpenuhi.

2) Unsur dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana atau perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa luka adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain yang dalam hal ini terpidana.

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan terpidana dan agar bisa masuk dalam unsur

ini maka si korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari-hari.

Bahwa karena unsur ini adalah alternative yaitu antara rasa sakit dan luka, maka majelis hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yaitu menimbulkan rasa sakit.

Bahwa terpidana melakukan penganiayaan dengan cara pemukulan kepada korban di bagian rahang bawah yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor 46/VIS/RSAL/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fakhri yang pokoknya menyatakan bahwa korban luka kecil dibagian pergelangan tangan kiri, rahang sebelah kiri terasa sakit dan kepala pusing serta mengalami memar akibat pukulan dengan gagang sangkur namun tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Karenanya majelis hakim merasa bahwa unsur dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain telah terpenuhi.

Selain itu majelis hakim menilai adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terpidana, yang itu adalah kondisi kejiwaan dari terpidana sesuai dengan Surat Laporan Medik/Psikiatri RSAL Surabaya terhadap pasien Sertu Mar Bambang Soesilo yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa yang bersangkutan menderita gangguan jiwa jenis skizofrenia. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa terpidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas

kesalahannya yang telah melakukan pemukulan kepada korban karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terpidana yang dinaungi keadaan-keadaan sebagaimana dalam pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Menurut analisa penulis, pertimbangan yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus perkara ini dengan melepaskan terpidana dari segala tuntutan oditur militer sudah sesuai dengan fakta yang didapat dipersidangan karena kondisi kejiwaan terpidana yang terganggu oleh karenanya terpidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan pemukulan kepada korban karena hal tersebut diluar dari kesadaran dari diri terpidana. Selain itu putusan yang dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Dalam putusan ini hakim yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dan didukung oleh minimal alat bukti yang sah diantaranya keterangan saksi, keterangan ahli (ahli kedokteran forensik dan ahli kejiwaan), dan surat (Visum Et Repertum dan Laporan Medis Kejiwaan). Namun hakim menilai bahwa terdapat alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana

dari terdakwa sehingga hakim tepat untuk memutus perkara ini dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

B. Implikasi Yuridis Dari Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Oleh Pengidap Gangguan Kejiwaan.

1. Penafsiran Pasal 44 KUHP dan Doktrin Para Ahli Mengenai Penilaian Kondisi Kejiwaan Seseorang

Didalam hukum pidana, untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana didasarkan pada pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggungjawab yang dimiliki oleh tersangka atau terpidana. Kemampuan bertanggungjawab didasarkan kepada keadilan dan kemampuan jiwa (*geestelijk vergomens*) dan bukan pada keadaan dan kemampuan berfikir (*vanstanselijk vergoments*). Dalam KUHP, terdapat satu ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.”

Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHP tersebut dapat ditarik makna bahwa seseorang tidak dapat dihukum apabila seseorang pelaku dihinggapi:

a. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya

Jiwa cacat dalam tumbuhnya menunjukkan pada keadaan bahwa jiwanya dalam pertumbuhannya terhambat atau terlambat. Hal ini

terdapat misalnya pada orang yang sudah dewasa akan tetapi pertumbuhan jiwanya masih seperti anak-anak.

b. Terganggu karena penyakit

Terganggu karena penyakit dapat dikatakan bahwa pada mulanya keadaan jiwanya sehat, akan tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.

Menurut Adami Chazawi dalam KUHP tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab. Sementara itu kapan seseorang dianggap bertanggungjawab dapat diartikan kebalikannya yaitu apabila tidak terdapat tentang dua keadaan jiwa sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 44 KUHP.⁶⁴

Dari bunyi pasal 44 ayat (1) KUHP diatas, jelas bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana saat ia melakukan tindak pidana karena seorang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepadanya karena jiwanya cacat baik dalam tumbuh kembangnya maupun karena suatu penyakit.

Untuk menentukan siapa yang berhak menilai kondisi kejiwaan dari tersangka atau terpidana, para ahli berpendapat sebagai berikut:

- a. Pompe mengatakan bahwa jiwa cacat dalam pertumbuhannya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu jiwa karena penyakit

⁶⁴ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm 146

(*ziekelyke storing*) bukan pengertian dari sudut kedokteran, tetapi pengertian hukum, karena yang pokok disini bukan semata-mata pada keadaan jiwa si pembuat, tetapi tentang bagaimana hubungan jiwa sipembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Apakah ada hubungan yang sedemikian rupa eratny sehingga si pembuat tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Menetapkan ada tidaknya hubungan keadaan jiwa dengan perbuatannya itu merupakan wewenang dari hakim dan bukan ahli jiwa.⁶⁵

- b. Van Hammel berpendapat bahwa tentang ada atau tidaknya “*toerekeningsvatbaarheid*” atau dapat dipertanggungjawabkan secara pidana” yang pada hakikatnya merupakan suatu pengertian yuridis itu, pada akhirnya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP hakimlah yang harus menentukannya.⁶⁶

Dari kedua doktrin ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki wewenang untuk menentukan apakah kondisi kejiwaan dari terpidana memenuhi rumusan pasal 44 ayat (1) KUHP atau tidak. Karena hakim tidak memiliki pengetahuan atau kurang ahli dalam menilai kondisi kejiwaan tersangka maka hakim perlu untuk mendapat masukan dari ahli yang dalam hal ini adalah ahli kejiwaan.⁶⁷ Pasal 180 ayat (1) KUHP menentukan: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya

⁶⁵ Adami Chazawi, Op.Cit, halaman 23

⁶⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 402

⁶⁷ Pasal 71 UU Nomor 18 Tahun 2014 menyatakan bahwa: (1) Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa. (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau b, menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

persoalan yang timbul disidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Keterangan ahli yang menyampaikan kesimpulan mengenai kondisi kejiwaan dari para terpidana merupakan suatu kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya, akan tetapi hakim tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu jika bertentangan dengan keyakinannya. M. Yahya Harahap menulis mengenai masalah kekuatan pembuktian dari keterangan ahli sebagai berikut:

“...,nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau vrij bewijskracht. Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.”⁶⁸

Keterangan ahli sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap memiliki kekuatan pembuktian bebas yang artinya tidak mengikat hakim melainkan diserahkan kepada penilaian hakim yang ini sejalan dengan sistem pembuktian negatief-wettelijk yang dianut dalam pasal 183 KUHAP, dimana alat-alat bukti memiliki kedudukan sebagai dasar yang dapat menimbulkan keyakinan pada hakim. Namun demikian, alat bukti keterangan ahli seharusnya tidak dapat dengan mudah dikesampingkan

⁶⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 829

begitu saja oleh hakim. Bila akhirnya hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli maka hakim wajib mempertimbangkan didalam putusannya mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.⁶⁹

2. Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional

Menentukan tujuan pidana menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pidana ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pidana dalam hukum pidana.⁷⁰ Terdapat tiga tujuan dari pidana, yaitu:

a. Teori absolut/pembalasan

Teori ini tidak memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana sehingga teori ini hanya untuk balas dendam dan tidak memikirkan nilai kemanusiaan sehingga teori ini tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan agar menjadi baik.

b. Teori relative/tujuan

Menurut teori relatif, tujuan pidana adalah untuk:

- 1) Mencegah terjadinya suatu kejahatan
- 2) Menakut-nakuti agar orang tidak melakukan kejahatan
- 3) Memperbaiki pelaku kejahatan

⁶⁹ Ibid, hlm 284

⁷⁰ Zainal Abidin, *Pidana, Pidana dan Tindakan dalam: Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3* (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm 10

4) Memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kejahatan

Jadi menurut teori ini adalah untuk mencegah agar ketertiban di masyarakat tidak terganggu dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku melainkan untuk menjaga ketertiban umum.

c. Teori gabungan/integratif

Menurut Muladi, teori integrative bertujuan untuk memperbaiki kerusakan individu dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat bersifat kasuistis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud diatas adalah:

- 1) Pencegahan (umum dan khusus)
- 2) Perlindungan Masyarakat
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat
- 4) Pengimbalan/Pengimbangan.

Pada hakikatnya tujuan pemidanaan disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Dari sisi hukum positif di Indonesia, tujuan pemidanaan belum/tidak ditemukan, tetapi wacana tujuan pemidanaan telah dirumuskan di dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dalam Konsep RUU KUHP Baru tahun 2013 dalam pasal 54 dirumuskan sebagai berikut:

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

3. Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Perspektif Disparitas

Dalam memutus suatu perkara yang terdapat di pengadilan, hakim memiliki beberapa tujuan hukum yang dimaksudkan untuk memutus perkara tersebut sebagaimana yang pada saat itu harus diputus. Tujuan hukum tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu, kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dari ketiga hal ini tujuan hukum sebenarnya saling berhubungan, sebagai contoh yang penulis ambil. Ketika seseorang tersebut akan dihukum maka hakim dapat melihat ketiga macam tujuan hukum yang saat ini telah digunakan dalam hukum Indonesia, yang pertama adalah kemanfaatan yakni adakah manfaatnya atau memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Kemudian adalah kepastian hukum, Utrecht berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁷¹ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷²

Hakim dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia memiliki suatu kewenangan atau kebebasan dalam membuat putusan yang mana hal tersebut biasa dianggap sebagai diskresi yang dilakukan oleh hakim. Kebebasan penuh yang dimiliki oleh hakim akan menimbulkan masalah baru bagi keadilan karena menjadikan putusan akan sangat dipengaruhi oleh perspektif atau penilaian pribadi dari para hakim akan memegang peranan. Tetapi karena tidak adanya undang-undang yang lengkap yang dapat mengatur semua perilaku manusia serta pemecahan dalam pemberian keadilan, perlu adanya undang-undang yang mengatur mengenai alternatif dari diskresi yang dapat dilakukan oleh para hakim. Hal

⁷¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 120

⁷² Achmad Ali, *Op.Cit.* hlm 82-83

ini perlu untuk memberikan kebebasan kepada hakim namun didasari dengan kepastian hukum guna mengurangi adanya disparitas.

Dari beberapa uraian diatas jelas bahwa menurut doktrin yang disampaikan oleh para ahli menyatakan bahwa alat bukti keterangan ahli dalam hukum positif di Indonesia memiliki kekuatan pembuktian yang bebas bukan bernilai sempurna yang berarti bahwa hakim tidak terikat atau memiliki kebebasan untuk menggunakan atau mengesampingkan keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Begitu juga dalam penelitian ini, hakim bebas untuk menentukan apakah akan menggunakan atau mengesampingkan keterangan ahli dokter kejiwaan yang disampaikan.

Pendapat Van Hammel dan Pompe dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menilai kondisi kejiwaan dari terpidana adalah hakim, namun karena hakim tidak memiliki pengetahuan atau keahlian dibidang kejiwaan maka hakim akan meminta keterangan ahli dokter kejiwaan. Dalam Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 hakim tidak yakin dengan keterangan ahli kejiwaan yang menyatakan bahwa terpidana menderita gangguan kejiwaan jenis skizofrenia sehingga dalam putusannya hakim mengesampingkan keterangan ahli sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut. Hakim dalam hal ini menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar hakim untuk mengesampingkan keterangan yang diberikan oleh ahli, namun peneliti merasa bahwa hakim terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan hal tersebut. Seharusnya jika hakim tidak yakin dengan keterangan yang diberikan oleh ahli, hakim dapat meminta keterangan ahli lainnya guna mendapatkan keyakinan akan hal tersebut dan melakukan perbandingan keterangan ahli.

Pengesampingan yang dilakukan oleh hakim tersebut berarti hakim telah menyimpangi daripada ketentuan pasal 44 KUHP dimana setiap yang cacat jiwanya dalam tumbuh kembangnya atau karena suatu penyakit tidak dipidana. Dalam putusan tersebut, terpidana mengidap gangguan kejiwaan berat jenis Skizofrenia yang berarti terpidana seharusnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana seperti halnya dalam putusan nomor 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya; dan/atau
 - b. menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Jadi dalam undang-undang tersebut seharusnya keterangan ahli dokter kejiwaan dijadikan sebagai pertimbangan utama hakim sebelum memutuskan suatu perkara dengan terpidana yang diduga mengidap gangguan kejiwaan seperti halnya kedua putusan diatas. Penyimpangan yang dilakukan oleh hakim ini dikhawatirkan akan menimbulkan precedent buruk dikemudian hari karena dapat menimbulkan pemaknaan pasal 44 KUHP secara bebas oleh masing-masing hakim yang berakibat adanya disparitas dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa

khususnya skizofrenia. Jika disparitas dikaitkan teori kepastian hukum, maka kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum karena kedua putusan tersebut mempunyai putusan yang berbeda. Putusan pertama menilai bahwa kondisi kejiwaan terpidana tidak berpengaruh pada pertanggungjawaban terpidana, sedangkan pada putusan kedua hakim berpendapat bahwa karena kondisi kejiwaannya terpidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibebaskan dari segala tuntutan. Hal ini jelas merupakan suatu ketidakpastian hukum yang secara langsung tidak memenuhi rasa keadilan seperti yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch.

Dengan menjatuhkan pidana terhadap terpidana dengan gangguan kejiwaan skizofrenia, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang ingin dicapai. Secara umum tujuan pemidanaan adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat, mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dan bagi pelaku tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada penderita gangguan jiwa jenis skizofrenia hanya akan membatasi kebebasan dari penderita skizofrenia agar tidak membahayakan bagi keselamatan orang lain sementara permasalahan utamanya tidak terselesaikan. Dalam pasal 44 ayat

(2) KUHP menyatakan bahwa:

- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya terpidana dengan gangguan kejiwaan jenis skizofrenia mendapatkan rehabilitasi maksimal satu tahun guna menyembuhkan gangguan kejiwaan yang hal tersebut dijamin oleh undang-undang yang berlaku. Jika pasal 44 KUHP dapat disimpangi oleh majelis hakim maka pasal tersebut akan menjadi tidak pasti karena pasal tersebut merupakan prinsip dasar bagi penghapusan atau peniadaan pembedaan bagi terpidana atau tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/VI/2017 tidak terdapat adanya disparitas putusan karena kedua putusan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Namun dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan yaitu pada penilaian hakim terhadap keterangan ahli kejiwaan mengenai kondisi kejiwaan terpidana yang disampaikan dipersidangan. Pada putusan pertama, hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan terpidana tidak berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Sedangkan putusan kedua, hakim sependapat dengan keterangan yang disampaikan oleh ahli. Hal ini mengakibatkan perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, putusan pertama majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) tahun kepada terpidana, sedangkan putusan kedua majelis hakim memvonis bebas terpidana karena hakim menilai terpidana tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.
2. Penafsiran pasal 44 KUHP yang sangat luas memungkinkan munculnya disparitas lain dikemudian hari. Hal tersebut memang tidak bertentangan dengan undang-undang karena hakim memiliki kewenangan untuk menentukan kondisi kejiwaan dari terpidana. Namun karena hakim tidak memiliki pengetahuan atau keahlian dibidang kejiwaan maka seharusnya

hakim lebih memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh ahli dan tidak tergesa-gesa untuk tidak sependapat atau mengesampingkan keterangan ahli. Dengan menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana yang menderita gangguan kejiwaan maka hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena penjatuhan penjara kepada penderita gangguan jiwa hanya akan membatasi kebebasan dari penderita skizofrenia agar tidak membahayakan bagi keselamatan orang lain sementara permasalahan utamanya tidak terselesaikan.

B. Saran

1. Membuat peraturan atau pedoman mengenai dasar hakim dalam menilai kondisi kejiwaan dari terpidana serta pembatasan terhadap kebebasan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan dipersidangan yang diluar dari kompetensi yang dimiliki oleh hakim agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antar hakim yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Membuat pedoman atau pengklasifikasian kondisi-kondisi kejiwaan apa saja yang dapat melepaskan terpidana dari tuntutan hukum sehingga terpidana yang menderita gangguan kejiwaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam: Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta: ELSAM.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja.
- Anwar, Yesmil, dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Arief, Barda Nawawi, dan Muladi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hanafi. 1999. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum* Vol.6 27.
- Harahap, Yahya. 2000. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Hawari, Dadang. 2009. *Pendekatan Holistik Pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Jakarta: FKUI.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Jonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Isaacs, Ann. 2004. *Panduan Belajar: Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikiatri edisi 3*. Jakarta: EGC.
- Kansil, CST, dan Christine ST Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramit.

- Kaplan, H I, dan B J Sadock. 2010. *Sinopsis Psikiatri Jilid 2 : edisi VII*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Lamintang, P.A.F, dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis, W.F. 2008. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Masriani, Yulies Tiena. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedepalan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhlisin, Ahmad. n.d. *Medikus.com*. Accessed Mei 2, 2018. <https://mediskus.com/dasar/penilaian-tingkat-kesadaran-berdasarkan-nilai-gcs>.
- Prasetyo, teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia.
- Ruba'i, Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Aksara Biru.
- Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Semiun, Yustinus. 2010. *Kesehatan Mental, Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman **Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157** Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa **Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185**
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 109-K/PM.III-12/AL/ VI/2017

